

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019 - 2023**

SKRIPSI

**Memenuhi Persyaratan
untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1
Program Studi Akuntansi**



Diajukan Oleh :

MAYANG AVIRA MAHARDANI

NPM. 231003622011045

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

2025

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019 - 2023**

SKRIPSI

**Memenuhi Persyaratan
untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1
Program Studi Akuntansi**



Diajukan Oleh :

MAYANG AVIRA MAHARDANI

NPM. 231003622011045

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2019 - 2023**

Dipersiapkan dan disusun oleh

MAYANG AVIRA MAHARDANI

NPM. 231003622011045

Telah Dipertahankan di depan Dosen Penguji

Pada Tanggal 7 Maret 2025

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Drs. Setyobudi, S.E., M.M., Ak

Penguji 1

Dra. C. Sri Haryanti S.E., M.Si., Akt., CA

Pembimbing

Puji Setya Sunarka, S.Pd, SE, M.Si

Penguji 2

Semarang, Maret 2025

Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Dekan,

Dra. Nurchayati, SE, MM, Akt.CA

NRP: 111357

PERUNTUKAN DAN MOTO

PERUNTUKAN

Puji Syukur atas berkat yang melimpah, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya ini saya persembahkan untuk:

Keluarga tercinta yang memberikan dukungan dan motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih sayang tak terhingga.

MOTTO

“The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle.”

— Steve Jobs

Judul : Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023
Title : *The Influence of Regional Taxes and Levies on Local Revenue in Central Java Province from 2019 to 2023*
Nama : Mayang Avira Mahardani
NPM : 231003622011045

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 – 2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 – 2023. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji *Goodness of Fit* (Uji Model), uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Pada variabel retribusi daerah secara parsial menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan hasil penelitian secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023”.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat sarjana S-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Dalam proses penyusunan sampai penyelesaian skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dra. Nurchayati, S.E., MM., Akt., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
2. Ibu Dra. C. Sri Haryanti, S.E., M.Si., Akt., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Pimpinan dan staf Kantor Bapenda Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu memberikan informasi dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu, selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Penulis sangat menghargai setiap masukan dan saran yang dapat memperbaiki skripsi ini ke depannya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Semarang, Maret 2025

Penulis,

Mayang Avira Mahardani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERUNTUKAN DAN MOTO	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang Penelitian	I-1
1.2. Rumusan Masalah	I-4
1.3. Pertanyaan Penelitian	I-4
1.4. Tujuan Penelitian.....	I-5
1.5. Manfaat Penelitian.....	I-5
II TINJAUAN PUSTAKA.....	II-1
2.1. Telaah Teori.....	II-1
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	II-1
2.1.2. Pajak Daerah.....	II-2
2.1.3. Retribusi Daerah	II-5
2.2. Penelitian Terdahulu.....	II-7
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Rumusan Hipotesis.....	II-10
2.3.1. Kerangka Pemikiran Teoritis	II-10
2.3.2. Rumusan Hipotesis	II-15
III METODE PENELITIAN	III-1
3.1. Populasi dan Sampel	III-1
3.2. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel.....	III-1
3.2.1. Variabel Independen	III-1
3.2.2. Variabel dependen	III-2
3.3. Metode Pengumpulan Data	III-3

3.4. Teknik Analisis Data	III-3
3.4.1. Analisis Deskripsi	III-3
3.4.2. Analisis Inferensial	III-3
3.4.2.1. Uji Normalitas.....	III-4
3.4.2.2. Uji Asumsi Klasik.....	III-4
3.4.2.3. Uji <i>Goodness of Fit</i> (Uji Model).....	III-6
3.4.2.4. Uji Hipotesis (Uji T)	III-6
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	IV-1
4.1 Deskripsi Hasil Penelitian	IV-1
4.2 Statistik Deskriptif Variabel	IV-1
4.3 Analisis Hasil Penelitian	IV-2
4.3.1. Analisis Regresi Linier Berganda.....	IV-2
4.3.2. Uji Normalitas	IV-3
4.3.3. Uji Asumsi Klasik.....	IV-4
4.3.4. Uji <i>Goodness of Fit</i> (Uji Model)	IV-5
4.3.5. Uji Hipotesis (Uji t)	IV-6
4.4 Pembahasan	IV-7
4.4.1. Pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	IV-7
4.4.2. Pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	IV-8
4.4.3. Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	IV-9
V BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	V-1
5.1. Simpulan.....	V-1
5.2. Saran.....	V-1

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
1. Data Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019 – 2023	I-3
2. Penelitian Terdahulu	II-8
3. Statistik Deskriptif Variabel.....	IV-1
4. Hasil Pengujian Regresi	IV-2
5. Hasil Pengujian Normalitas	IV-3
6. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas	IV-4
7. Pengujian Multikolinieritas	IV-4
8. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi	IV-5
9. Hasil Pengujian Model.....	IV-6
10. Hasil Pengujian Hipotesis Dengan Uji Parsial (Uji t).....	IV-6

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran Teoritis	II-15

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	Halaman
I. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 – 2023	1
II. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	12
III. Hasil Uji Normalitas	13
IV. Hasil Uji Heterokedastisitas.....	14
V. Hasil Uji Regresi Berganda.....	15
VI. T Tabel	16
VII. F Tabel	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung otonomi daerah, karena mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya yang ada secara mandiri, sebagaimana dijelaskan dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi landasan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menggantikan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya menetapkan prinsip-prinsip dasar otonomi daerah, termasuk kewenangan daerah dalam mengelola keuangannya sendiri melalui pajak dan retribusi yang mana berkesinambungan dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur pengelolaan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah dari berbagai sumber yang dikelola secara mandiri oleh suatu daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi sebagai indikator kemandirian suatu daerah, hal tersebut tercermin dalam kemampuan daerah untuk membiayai pengeluaran dan melaksanakan program – program dengan tidak terlalu bergantung pada sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat. Semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar pula tingkat kemandirian daerah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin rendah tingkat kemandirian daerah tersebut.

Pemerintah berperan dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan yang menentukan keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta melaksanakan pembangunan dan pelayanan di Masyarakat. Pembangunan di Jawa Tengah erat kaitannya dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Potensi ekonomi yang dimanfaatkan secara optimal dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang berkontribusi dalam pembangunan daerah serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Pajak Daerah adalah sumber potensi yang nilainya cukup besar. Pajak Daerah itu sendiri merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat digunakan dalam pembiayaan dalam rangka kesejahteraan masyarakat meliputi belanja pegawai sampai pembiayaan proyek pembangunan (jalan, jembatan, rumah sakit, dll).

Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pungutan atas balas jasa yang dapat dilakukan berulang kali, siapapun yang menikmati jasa tersebut akan dikenai retribusi. Sehingga semakin berkembangnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat maka semakin besar potensi retribusi daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan otonomi daerah dengan menggali potensi untuk mengurangi ketergantungan dari Pemerintah Pusat. Kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendatangkan pemasukan dalam mencapai target anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan berbagai upaya yang bertujuan untuk mencapai target anggaran pendapatan yang telah ditetapkan. Upaya tersebut terlihat dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya. Namun tidak dipungkiri peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak seiring dengan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya. Berdasarkan Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) Tahun 2019 – 2023 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari BPKAD Provinsi Jawa Tengah terdapat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang fluktuatif hal tersebut disajikan melalui data sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Data Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019 – 2023

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah		Retribusi Daerah		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2019	11.999.332.158	11.951.919.536	121.453.464	114.861.059	14.488.333.544	14.437.914.237
2020	12.007.135.432	11.139.173.310	93.728.474	93.279.122	14.267.084.822	13.668.282.279
2021	12.656.260.599	11.718.378.321	90.105.999	91.634.270	15.017.805.787	14.695.474.899
2022	13.754.458.219	13.484.851.152	109.285.847	115.158.015	16.141.754.406	16.264.618.854
2023	15.266.021.456	13.976.642.717	133.505.332	139.377.039	17.992.953.192	17.012.509.422

Sumber: Data LRA BPKAD Provinsi Jawa Tengah yang diolah 2025

Melalui data diatas, dapat diketahui bahwa target anggaran pendapatan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada Tahun 2019 ke 2020 target anggaran pendapatan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan, kemudian mengalami peningkatan kembali pada Tahun 2021 s.d. 2023, namun demikian capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya tercapai di Tahun 2022. Target anggaran Pajak Daerah selalu meningkat setiap tahunnya, meningkatnya target anggaran Pajak Daerah setiap tahunnya tidak seiring dengan Realisasi Pajak Daerah yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya, hal tersebut terlihat dari penurunan realisasi yang terjadi pada Tahun 2019 ke 2020 dan kemudian mengalami peningkatan kembali pada Tahun 2021 s.d. 2023, sehingga capaian realisasi Pajak Daerah tiap tahunnya tidak optimal dan cenderung tidak memenuhi target anggaran Pajak Daerah. Pada Retribusi Daerah target anggaran yang ditetapkan cenderung mengalami fluktuasi tiap tahunnya, hal tersebut dijelaskan dengan adanya penurunan target anggaran dari Tahun 2019 s.d 2021 dan peningkatan kembali tahun 2022 dan 2023, realisasi Retribusi Daerah cenderung mengalami fluktuasi dengan capaian target Retribusi Daerah tercapai pada Tahun 2021 s.d. 2023.

Penelitian (Mailindra, 2022) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi” menunjukan

bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain itu penelitian (Nurazizah, 2023) yang berjudul “Analisis Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten” menunjukkan bahwa efektivitas dan kontribusi pajak daerah berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah, berbeda dengan penelitian (Gulo, 2023) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 - 2020” yang menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023”**.

1.2. Rumusan Masalah

Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak sesuai dengan target anggaran yang telah ditetapkan, hal tersebut dapat menyebabkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurun disebabkan oleh penerimaan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah yang tidak mencapai target setiap tahunnya. Sehingga besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bergantung kepada besarnya penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terjadi, maka terdapat pertanyaan penelitian diantaranya:

1. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023?

2. Bagaimana pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023?
3. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023;
2. Mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023;
3. Mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta informasi dalam menganalisis pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan wawasan akademis terkait desentralisasi fiskal khususnya kebijakan pajak dan retribusi di tingkat daerah yang dapat mendukung kemandirian finansial dan pembangunan daerah.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada Mahasiswa mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah. Sehingga Mahasiswa memahami lebih dalam tentang keuangan publik khususnya memahami lebih dalam tentang konsep pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan terkait pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, serta membantu dalam mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini menambah wawasan dan informasi kepada penulis, khususnya terkait pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Telaah Teori

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengeloaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan yang dikumpulkan langsung oleh pemerintah daerah, dapat dikendalikan, diproyeksikan, dan ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah melalui keputusan, prosedur, dan tidakan daerah disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (Anggoro et al., 2023).

Menurut (Mardiani, 2022) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segala penerimaan daerah yang bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut yang diatur oleh peraturan daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik didaerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya (Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan dari beberapa definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, maka dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari potensi - potensi daerah yang terdiri atas berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber-sumber pendapatan sah lainnya dan dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang harapannya dapat digunakan untuk pembangunan infrstruktur serta peningkatan pendapatan.

2.1.1.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah secara mandiri, bukan dari transfer dana dari Pemerintah Pusat.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 secara spesifik menyebutkan bahwa PAD terdiri dari beberapa sumber utama, yaitu:

1. Pajak Daerah:

Jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah telah diatur secara rinci dalam undang-undang ini. Contohnya adalah pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, dan lain-lain.

Pemerintah Daerah memiliki otonomi dalam menetapkan tarif dan dasar pengenaan pajak daerah, namun tetap harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Retribusi Daerah:

Retribusi adalah pembayaran yang dibebankan kepada pihak tertentu sebagai imbalan atas pelayanan khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Contoh retribusi daerah adalah retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi pelayanan parkir, dan retribusi pemanfaatan air permukaan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah aset daerah yang dikelola secara terpisah dari aset daerah lainnya.

Hasil pengelolaan kekayaan ini, seperti hasil penjualan aset atau pendapatan dari usaha yang dilakukan, menjadi bagian dari PAD.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

Selain ketiga sumber di atas, terdapat sumber PAD lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contohnya adalah pendapatan dari hasil penjualan barang milik daerah, denda, dan bunga.

2.1.2. Pajak Daerah

2.1.2.1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut negara kepada masyarakat dengan tidak mendapatkan kontraprestasi langsung (Hidayati et al., 2024). Pajak daerah merupakan jenis pemungutan pajak yang dibagi berdasarkan kewenangannya.

Pajak daerah adalah pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, kepada individu atau

badan usaha yang tinggal atau beroperasi di wilayah tersebut. Menurut (Hidayati et al., 2024) pajak daerah merupakan pajak yang dipungut untuk membiayai rumah tangga daerah. Selain itu, pajak daerah dipungut untuk membiayai berbagai kegiatan dan layanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan umum lainnya.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2023), dari definisi tersebut disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara;
2. Berdasarkan Undang-Undang;
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk;
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak Daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada Daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Daerah sebagai badan hukum publik (Putri, 2022).

Dari definisi tersebut, penulis membuat kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan iuran yang wajib dan memiliki sifat memaksa tanpa adanya imbalan secara langsung yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

2.1.2.2. Fungsi-fungsi Pajak Daerah

Fungsi pajak daerah adalah peran atau tujuan utama dari pemungutan pajak oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Beberapa fungsi utama pajak daerah menurut (Mardiasmo, 2023) meliputi:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.2.3. Jenis – jenis Pajak Daerah

Pajak daerah berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan operasional, seperti infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan program kesejahteraan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Menurut Pasal 4 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jenis-jenis pajak dibagi menjadi jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi diantaranya:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. Pajak Alat Berat (PAB)
4. Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
5. Pajak Air Permukaan (PAP)
6. Pajak Rokok
7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan (MLB)

Sedangkan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diantaranya:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
4. Pajak Reklame
5. Pajak Air Tanah (PAT)
6. Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan (MLB)
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

2.1.3. Retribusi Daerah

2.1.3.1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan usaha. Retribusi berbeda dengan pajak karena dalam retribusi, wajib retribusi mendapatkan imbalan langsung berupa jasa atau izin dari pemerintah daerah yang diberikan secara langsung.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Fungsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Penerapan retribusi utamanya mendistribusikan biaya barang dan jasa sesuai dengan manfaat yang diterima oleh pengguna (Anggoro et al., 2023)

Retribusi Daerah memiliki karakteristik yang membedakan dengan pungutan lainnya. Ciri-ciri Retribusi Daerah diantaranya:

1. Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) yaitu Peraturan Daerah (Perda).
2. Dibebankan kepada setiap masyarakat wajib retribusi, yaitu orang atau badan yang memakai layanan publik atau jasa dari pemerintah daerah.
3. Orang pribadi atau badan memperoleh balas jasa secara langsung sesaat telah membayar retribusi. Bahkan pada beberapa retribusi, balas jasa ini bisa dirasakan secara individu misalnya retribusi parkir di sisi jalanan umum.

2.1.3.2. Fungsi Retribusi Daerah

Fungsi utama pemungutan retribusi adalah hampir sama dengan pajak, yaitu sebagai sumber anggaran daerah, stabilitas ekonomi daerah serta pemerataan pendapatan masyarakat daerah. Retribusi yang berperan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi sebagai anggaran guna membiayai seluruh kebutuhan sehari-hari pemerintahan dan juga pembangunan daerah. Saat sumber anggaran di suatu daerah telah tercukupi, maka seluruh kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan baik. Fungsi lain dari retribusi adalah sebagai stabilitas ekonomi daerah yaitu mengendalikan harga pasar dan juga dapat membukakan lapangan kerja baru dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat. (Bapenda DKI Jakarta, 2022)

2.1.3.3. Jenis dan Objek Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Retribusi Daerah dikelompokkan menjadi 3 jenis diantaranya:

1. Retribusi Jasa Umum

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pelayanan Kebersihan;
 - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. Pelayanan pasar; dan
 - e. Pengendalian lalu lintas.
2. Retribusi Jasa Usaha

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. persetujuan bangunan gedung;
- b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. pengelolaan pertambangan rakyat.

2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu terdapat hal dasar yang penting dalam pengembangan penelitian ini, karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai teori, temuan, dan metodologi yang telah diterapkan pada topik yang serupa. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan diantaranya:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Wiyani Mailindra (2022) Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Tahun 2003 - 2018	Variabel Independen: - Pajak Daerah (X1) - Retribusi Daerah(X2) Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (Y)	Analisis Regresi Linier Berganda	- Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah - Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah - Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah
2	Casroni, Hilda Kumala Wulandari, Dumadi, Yenny Ernitawati (2022) Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes (Studi Empiris Kantor Bapenda Kabupaten Brebes Periode Tahun 2016-2021)	Variabel Independen: - Pajak Daerah (X1) - Retribusi Daerah(X2) Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah (Y)	Analisis Regresi Linier Berganda	- Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah - Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah - Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
3	Aulia Rahmana Putri (2022) Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Periode 2016 - 2021	Variabel Independen: - Pajak Daerah (X1) - Retribusi Daerah(X2) Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (Y)	Analisis Regresi Linier Berganda	- Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah - Retribusi Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah - Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah
4	Siti Mardiani (2022) Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap	Variabel Independen: - Pajak Daerah (X1) - Retribusi Daerah(X2)	Analisis Regresi Linier Berganda	- Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah - Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan

No	Nama Peneliti	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Periode 2016-2020	Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (Y)		terhadap Pendapatan Asli Daerah - Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah
5	Tiara Kencana, Aladin, Rosy Armaini (2022) Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bengkulu	Variabel Independen: - Pajak Daerah (X1) - Retribusi Daerah(X2) Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (Y)	Analisis Regresi Linier Berganda	- Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah - Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah - Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah
6	Yasatulo Gulo (2023) Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011-2020	Variabel Independen: - Pajak Daerah (X1) - Retribusi Daerah(X2) Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah (Y)	Analisis Regresi Linier Berganda	- Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah - Retribusi daerah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan asli daerah - Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah
7	Muhammad Iqbal, Iseu Anggraini, Sendy Setyana (2023) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2014 - 2021	Variabel Independen: - Pajak Daerah (X1) - Retribusi Daerah(X2) Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (Y)	Analisis Regresi Linier Berganda	- Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah - Retribusi Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah - Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
8	Melaisya Nurazizah (2023)	Variabel Independen:	Analisis Regresi Data Panel	- Efektivitas dan Kontribusi pajak daerah berpengaruh negatif

No	Nama Peneliti	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
	Analisis Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten	Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah (X1) Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah (Y) - Tingkat Kemandirian Daerah		terhadap pendapatan asli daerah - Efektivitas pajak daerah dan kontribusi pajak daerah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah
9	Nina Sakinah, Siti Nuridah , Bella Puspita Audina (2023) Pengaruh Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017-2022	Variabel Independen: - Pajak Daerah (X1) - Retribusi Daerah(X2) Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah (Y)	Analisis Regresi Data Panel	- Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah - Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah - Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah
10	Syalom Kondojo,Rocyke Pangkey, James Manengkey (2024) Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Kota-Kota Di Sulawesi Utara Tahun 2013-2022)	Variabel Independen: - Pajak Daerah (X1) - Retribusi Daerah(X2) Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah (Y)	Analisis Regresi Data Panel	- Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan - Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah

Sumber: Disarikan dari berbagai penelitian tahun 2025.

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Rumusan Hipotesis

2.3.1. Kerangka Pemikiran Teoritis

2.3.1.1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada tingkat provinsi, penerimaan pajak daerah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerimaan pajak daerah tingkat provinsi dapat mencakup pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, dan pajak lain-lain yang menjadi elemen penting dalam membiayai operasional dan pembangunan daerah.

Pajak daerah digunakan sebagai sumber pendapatan asli yang bisa dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah melalui badan pendapatan daerahnya mampu menggali potensi dan mengoptimalkan penerimaan pajak agar berfungsi sesuai tujuannya (Hidayati et al., 2024). Hal ini memungkinkan pemerintah daerah memperoleh dana untuk menjalankan pembangunan, pelayanan publik, dan pemeliharaan infrastruktur. Pajak daerah pada tingkat provinsi memberikan kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan pajak daerah diharapkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan, yang pada akhirnya dapat mendukung program pembangunan di tingkat provinsi.

Pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan memiliki korelasi yang positif. Meningkatnya penerimaan dari pajak provinsi, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dll, berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi, sehingga memberikan dana yang lebih besar untuk pembangunan dan layanan publik di tingkat provinsi.

Berdasarkan penelitian (Gulo, 2023) bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar penerimaan Pajak Daerah maka semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan, sehingga semakin rendah Pajak Daerah yang diterima, semakin rendah pula penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan suatu wilayah. Selain itu menurut (Kondojo et al., 2024) Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang berarti bahwa penerimaan dari pajak daerah akan mempengaruhi tinggi dan rendahnya dari pendapatan asli daerah. Jika penerimaan pajak daerah meningkat maka penerimaan dari pendapatan asli

daerah akan meningkat. Sedangkan menurut (Nurazizah, 2023) Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa efektivitas dan kontribusi pajak daerah berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah, hal tersebut menggambarkan jika penerimaan pajak daerah menurun maka penerimaan dari pendapatan asli daerah akan menurun

Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2.3.1.2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas pelayanan tertentu yang diberikan kepada masyarakat atau sektor usaha. Berbeda dengan pajak, retribusi berhubungan langsung dengan layanan atau manfaat yang diberikan kepada pembayar.

Pada tingkat provinsi, retribusi mencakup berbagai jenis layanan yang bersifat publik, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pungutan retribusi dibedakan menjadi retribusi perizinan, retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha. Pendapatan dari retribusi ini langsung masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi sumber dana untuk mendukung kegiatan pembangunan serta penyediaan layanan publik.

Menurut (Anggoro et al., 2023) penerapan retribusi utamanya mendistribusikan biaya barang dan jasa sesuai dengan manfaat yang diterima oleh pengguna. Retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung terhadap PAD. Semakin tinggi penerimaan dari retribusi daerah, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi juga diharapkan akan meningkat. Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan yang relatif stabil dan berpotensi memberikan

kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama pada provinsi dengan kegiatan ekonomi tinggi.

Hubungan positif antara retribusi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semakin tinggi retribusi yang dikumpulkan oleh provinsi, semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh, sehingga pemerintah provinsi memiliki lebih banyak dana untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Setiap peningkatan penerimaan dari retribusi daerah akan langsung meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah yang mampu memaksimalkan pengelolaan retribusi secara efektif dapat mengandalkan sumber ini untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah.

Berdasarkan penelitian (Gulo, 2023) bahwa Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PAD. Makin tinggi Retribusi Daerah makin tinggi pula PAD, demikian juga sebaliknya. Selain itu menurut penelitian (Kondojo et al., 2024) Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berarti bahwa penerimaan dari retribusi daerah akan mempengaruhi tinggi dan rendahnya dari pendapatan asli daerah. Jika penerimaan retribusi daerah meningkat maka penerimaan dari pendapatan asli daerah akan meningkat. Sedangkan menurut (Iqbal et al., 2023) Retribusi Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal tersebut menggambarkan jika penerimaan retribusi daerah menurun maka penerimaan dari pendapatan asli daerah akan menurun.

Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2.3.1.3. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk membiayai berbagai keperluan operasional dan pembangunan.

Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan pengertian pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah tanpa adanya imbalan langsung kepada pembayar, namun hasilnya dipergunakan untuk kepentingan publik. Pajak daerah di tingkat provinsi mencakup pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan sebagai imbalan atas jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau sektor usaha. Retribusi daerah mencakup retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu, dan retribusi jasa usaha. Kedua jenis penerimaan ini berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di provinsi tersebut.

Pajak daerah diharapkan berkontribusi besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pajak adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang stabil. Pajak ini memberikan pendapatan tetap yang dapat diandalkan oleh pemerintah provinsi dalam perencanaan anggaran. Retribusi daerah juga berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun sifatnya lebih fluktuatif karena tergantung pada layanan yang diberikan pemerintah provinsi kepada masyarakat. Retribusi memberikan kontribusi langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan, jika dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber tambahan yang signifikan.

Pajak Daerah dan Retribusi daerah secara teoritis memiliki hubungan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin optimal pengelolaan dan peningkatan penerimaan dari kedua sumber ini, semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan. Hal ini mendukung kapasitas pemerintah provinsi untuk mendanai program pembangunan dan layanan publik.

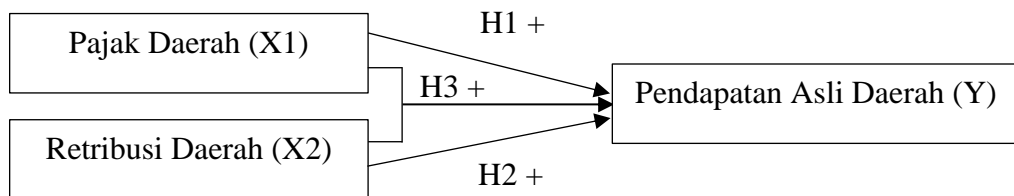
Menurut penelitian (Kencana et al., 2022) bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut

menggambarkan semakin besar penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka akan mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu menurut (Iqbal et al., 2023) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini dikarenakan kedua faktor tersebut benar-benar saling melengkapi dan tidak bisa sendiri-sendiri dalam menentukan naiknya Pendapatan Asli Daerah.

Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.3.2. Rumusan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan, maka disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- H2 : Penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- H3 : Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2022). Sedangkan pengertian sampel adalah sebagian dari populasi itu (Sugiyono, 2022).

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability* dengan Teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2022). Pertimbangan tertentu digambarkan dengan orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Peneliti menggunakan Teknik *purposive sampling* karena peneliti memerlukan sampel yang spesifik, bukan representasi acak dari populasi secara umum. Sehingga menggambarkan dengan tepat variabel yang diteliti, peneliti mengambil semua populasi sebagai sampel. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023.

3.2. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

3.2.1. Variabel Independen

Variabel Independen adalah variabel yang digunakan dalam penelitian untuk mempengaruhi atau menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen (variabel yang diamati atau diukur). Peneliti menggunakan variabel independen sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang diterima secara langsung oleh pembayar. Pajak Daerah sebagai variabel independent karena mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara

langsung yang berarti pajak bukanlah hasil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan sumber pendapatan yang membantu meningkatkan PAD.

Pengukuran Pajak Daerah dilakukan dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Daerah dengan target anggaran Pajak Daerah. Melalui pengukuran tersebut akan terlihat kemampuan Pemerintah Daerah dalam mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara langsung diberikan kepada individu atau badan usaha. Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang berfungsi meningkatkan kapasitas keuangan Pemerintah Daerah. Retribusi Daerah memiliki pengaruh langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berarti adanya peningkatan dalam penerimaan Retribusi Daerah akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengukuran Retribusi Daerah dilakukan dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Retribusi Daerah dengan target anggaran Retribusi Daerah. Melalui pengukuran tersebut akan terlihat kemampuan Pemerintah Daerah dalam mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.2.2. Variabel dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang menunjukkan hasil atas suatu perubahan yang disebabkan oleh variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari wilayahnya sendiri yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan melakukan perbandingan atas capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dengan target anggaran yang telah ditentukan. Melalui pengukuran tersebut akan terlihat kemampuan Pemerintah Daerah dalam mencapai target anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan studi kepustakaan dengan menghimpun informasi dan data yang ada di perpustakaan dalam bentuk seperti dokumen dan buku sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian. Serta dengan melakukan pengumpulan data sekunder dengan cara mengakses data melalui website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023.

3.4. Teknik Analisis Data

3.4.1. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif adalah analisis yang dilakukan dengan cara memilih data yang penting, baru, unik dan terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, analisis didasarkan pada seluruh data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data untuk memberi gambaran objek yang diteliti untuk membantu memahami dasar, karakteristik dan kecenderungan sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Berdasarkan data yang didapatkan deskripsi bagaimana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.4.2. Analisis Inferensial

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yang mana analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik parametrik. Statistik parametrik digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik, atau menguji ukuran populasi melalui data sampel (Sugiyono, 2017). Model yang digunakan dalam analisis ini adalah model regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda merupakan model analisis yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Menurut (Ghozali, 2018) Analisis regresi selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.

Dalam penelitian ini model regresi linier berganda dilakukan untuk mendapatkan gambaran bagaimana pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tingkat signifikansi 0,05.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

- Y : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- a : Konstanta
- b_1 : Koefisien Regresi Pajak Daerah
- X_1 : Pajak Daerah
- b_2 : Koefisien Regresi Retribusi Daerah
- X_2 : Retribusi Daerah
- e : Kesalahan Regresi

Sebelum menggunakan model regresi linier berganda tersebut, maka perlu dilakukan pengujian sebagai berikut:

3.4.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal (Ghozali, 2018). Selaras dengan (Priyatno, 2014) Uji normalitas perlu dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Pada uji kali ini, dilakukan Uji normalitas dengan metode One Sample Kolmogorov-Smirnov, untuk pengambilan keputusan apakah data terdistribusi normal atau tidak dengan membaca nilai signifikansi, apabila nilai signifikansi di atas 5% atau 0,05 maka data berdistribusi normal, atau sebaliknya.

3.4.2.2. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas adalah sebagai berikut:

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan dalam model regresi empiris sangat tinggi namun secara individual variabel – variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Melihat korelasi antar variabel independen. Jika korelasi antar dua atau lebih variabel independen lebih besar dari 0,90, ini menunjukkan adanya multikolinearitas yang serius.

- c. VIF digunakan untuk melihat apakah sebuah variabel independen berkorelasi kuat dengan variabel independen lainnya. Ghozali mengemukakan bahwa jika nilai VIF lebih dari 10, hal ini menandakan adanya multikolinearitas yang serius. Semakin tinggi nilai VIF, semakin besar masalah multikolinearitas yang ada.
- d. Tolerance adalah ukuran yang digunakan untuk melihat kebalikan dari VIF. Nilai tolerance dihitung dengan rumus $Tolerance = 1 / VIF$. Jika nilai tolerance kurang dari 0,10, ini menunjukkan adanya multikolinearitas yang tinggi, karena artinya variabel independen tersebut menjelaskan lebih dari 90% variabilitas dari variabel independen lainnya.

Maka untuk dapat mendeteksi multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) sebagai berikut:

- a. $Tolerance > 0,1$ atau $VIF < 10$, maka tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen.
- b. $Tolerance < 0,1$ atau $VIF > 10$, maka terjadi multikolonieritas antar variabel independen

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian residual (error) dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi (Ghozali, 2018). Heteroskedastisitas terjadi jika varian residual tidak konstan (berubah-ubah) sepanjang pengamatan. Jika asumsi homoskedastisitas (varian residual yang konstan) tidak terpenuhi, maka model regresi bisa menjadi tidak valid atau kurang efisien. Maka dalam penelitian ini untuk mendeteksi heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika hasil regresi menunjukkan bahwa ada variabel independen yang signifikan secara statistik (nilai signifikansi kurang dari 0,05), maka hal tersebut mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.

3.4.2.3. Uji *Goodness of Fit* (Uji Model)

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang disebabkan oleh variabel independen. R^2 adalah ukuran statistik yang digunakan untuk melihat seberapa baik data sesuai dengan model regresi yang dibuat (Ghozali, 2018). Nilai R^2 adalah rasio antara jumlah varians yang dijelaskan oleh model dengan total varians yang ada dalam variabel dependen.

Maka dapat disimpulkan dengan Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1:

- a. Jika $R^2 = 1$, maka semua variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen pada model.
- b. Jika $R^2 = 0$, berarti model tidak bisa menjelaskan variasi dalam variabel dependen sama sekali.

2. Uji F

Uji F merupakan uji signifikansi secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi maupun estimasi, apakah Y berhubungan linear terhadap X_1 dan X_2 . Dalam penelitian ini Uji F digunakan menguji signifikansi bagaimana pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

F hitung dibandingkan dengan F tabel yang didapatkan menggunakan tingkat resiko dan signifikansi 5% atau 0,05 dengan kriteria:

- a. $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- b. $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka variabel independen secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.4.2.4. Uji Hipotesis (Uji T)

Menurut (Ghozali, 2018), Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Pada Uji perhitungan (t-test) dibandingkan dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05, dengan kriteria:

- a. $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$, maka secara parsial variabel independen tersebut mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- b. $T_{hitung} < T_{tabel}$ atau nilai signifikansi $> 0,05$, maka variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 sehingga data yang dipergunakan dalam penelitian sebanyak 5 sampel penelitian.

4.2 Statistik Deskriptif Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah pada periode pengamatan tahun 2019-2023. Deskripsi variabel penelitian yang menggambarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan deviasi standar dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Statistik Deskriptif Variabel

	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah
N Valid	5	5	5
Missing	0	0	0
Mean	12,454,193,006,751.80	110,861,900,498.00	15,215,759,937,654.60
Std. Deviation	1,214,813,568,623.840	19,534,705,482.964	1,378,299,794,473.012
Minimum	11,139,173,309,780	91,634,269,205	13,668,282,278,855
Maximum	13,976,642,716,351	139,377,038,536	17,012,509,421,006

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2025, Lampiran 2

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa jumlah sampel penelitian (N) ada 5. Variabel pajak daerah secara keseluruhan memiliki rata-rata (*mean*) positif yaitu Rp. 12.454.193.006.751,80. Hal ini menunjukkan secara rata-rata 5 sampel kecenderungan mengalami kenaikan jumlah realisasi pajak daerah. Pajak daerah yang terkecil sebesar Rp. 11.139.173.309.780 di tahun 2020. Sedangkan pajak daerah yang terbesar Rp. 13.976.642.716.351 di tahun 2023. Nilai standar deviasi 1.214.813.568.623,840 menunjukkan nilai sebaran dari setiap sampel positif dan perbedaan pajak daerah antar sampel penelitian yang relatif jauh.

Variabel retribusi daerah secara keseluruhan memiliki rata-rata (*mean*) positif yaitu Rp. 110.861.900.498,00. Hal ini menunjukkan secara rata-rata 5 sampel kecenderungan mengalami kenaikan jumlah realisasi retribusi daerah. Retribusi

daerah yang terkecil sebesar Rp. 91.634.269.205 di tahun 2021. Sedangkan retribusi daerah yang terbesar Rp. 139.377.038.536 di tahun 2023. Nilai standar deviasi 19.534.705.482,964 menunjukkan nilai sebaran dari setiap sampel positif dan perbedaan retribusi daerah antar sampel penelitian yang relatif jauh.

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan memiliki rata-rata (*mean*) positif yaitu Rp. 15.215.759.937.654,60. Hal ini menunjukkan secara rata-rata 5 sampel kecenderungan mengalami kenaikan jumlah realisasi PAD. PAD yang terkecil sebesar Rp. 13.668.282.278.855 di tahun 2020. Sedangkan PAD yang terbesar Rp. 17.012.509.421.006 di tahun 2023. Nilai standar deviasi 1.378.299.794.473,012 menunjukkan nilai sebaran dari setiap sampel positif dan perbedaan PAD antar sampel penelitian yang relatif jauh.

4.3 Analisis Hasil Penelitian

4.3.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen dengan skala pengukuran dalam suatu persamaan linier. Hasil persamaan regresi pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode pengamatan tahun 2019-2023 sebagai berikut :

Tabel 4. 2
Hasil Pengujian Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	619974597280.915	1579728690558.649		.392	.733
Pajak Daerah	11.257	.218	1.108	5.771	.009
Retribusi Daerah	9.596	13.548	.136	6.708	.022

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2025, Lampiran 5

$$Y = 619.974.597.280,915 + 11,257 X_1 + 9,596 X_2 + e$$

Hasil persamaan regresi linier berganda tersebut di atas memberikan pengertian sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar **619.974.597.280,915** berarti apabila pajak daerah dan retribusi daerah konstan, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan naik.
2. Nilai koefisien regresi pajak daerah (b_1) sebesar **11,257** dan bertanda positif (+) hal ini menunjukkan bahwa apabila pajak daerah naik, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat.
3. Nilai koefisien regresi retribusi daerah (b_2) sebesar **9,596** dan bertanda positif (+) hal ini menunjukkan bahwa apabila retribusi daerah naik, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat.

4.3.2. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah sebuah uji untuk mengetahui apakah model regresi variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak dapat dilihat menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*.

Tabel 4. 3
Hasil Pengujian Normalitas

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0026550
	Std. Deviation	180895983507.34
Most Extreme Differences	Absolute	.236
	Positive	.236
	Negative	-.206
Test Statistic		.236
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2025, Lampiran 3

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa tingkat signifikan variabel penelitian $0,200 > 0,05$ maka model regresi terdistribusi normal, oleh sebab itu dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

4.3.3. Uji Asumsi Klasik

1. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana varians dan kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode pengamatan tahun 2019-2023 dengan uji *Glejser* sebagai berikut :

Tabel 4. 4
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-474909672244.429	325208432171.110		-1.460	.282
Pajak Daerah	.093	.045	1.701	2.065	.175
Retribusi Daerah	-4.764	2.789	-1.407	-1.708	.230

a. Dependent Variable: ABS

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2025, Lampiran 4

Berdasarkan tabel 4.4 di atas tidak terjadi heteroskedastisitas karena tingkat signifikan semua variabel pajak daerah dan retribusi daerah di atas 0,05.

2. Multikolinieritas

Pengujian ini untuk mengetahui adanya hubungan linear yang "sempurna" atau pasti di antara beberapa atau semua variabel independen yang menjelaskan model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Tabel 4. 5
Pengujian Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pajak Daerah	.234	4.281
Retribusi Daerah	.234	4.281

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2025, Lampiran 5

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui model regresi yang bebas multikolinieritas karena koefisien regresi antar variabel independen pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10.

4.3.4. Uji *Goodness of Fit* (Uji Model)

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dimana dalam penelitian ini menggunakan *R Square* mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil koefisien determinasi pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode pengamatan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 6
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.991 ^a	.983	.966	255825553254.915

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2025, Lampiran 5

Berdasarkan tabel 4.6 di atas hasil uji regresi didapatkan angka koefisien *R Square* sebesar 0,983. Hal ini berarti bahwa sebesar 98,3% Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan oleh pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan sisanya $100\% - 98,3\% = 1,7\%$ dijelaskan oleh variabel lain di luar model pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Uji Model (uji F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan kelayakan model persamaan regresi.

Tabel 4. 7
Hasil Pengujian Model
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	746794786638102 1000000000.000	2	373397393319051 0500000000.000	57.054	.017 ^b
Residual	130893427396367 0800000000.000	2	654467136981835 400000000.000		
Total	759884129377738 8000000000.000	4			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2025, Lampiran 5

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat diketahui hasil F hitung $57,054 > F$ tabel $5,79$ dan tingkat signifikan $0,017 < 0,05$ sehingga Hipotesis ke tiga (H3) : Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat diterima atau dikatakan bahwa regresi layak digunakan dalam penelitian.

4.3.5. Uji Hipotesis (Uji t)

Menggunakan uji t untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Tabel 4. 8
Hasil Pengujian Hipotesis Dengan Uji Parsial (Uji t)

No	Keterangan	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
1	Pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	5,771	4,303	0,009	Positif dan Signifikan
2	Pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	6,708	4,303	0,022	Positif dan Signifikan

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2025, Lampiran 5

Berdasarkan tabel 4.8 di atas untuk mengetahui hasil pengujian hipotesis dengan uji parsial adalah :

1. Hipotesis pertama (H_1) : Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil pengujian analisis regresi diperoleh t hitung sebesar $5,771 > t$ tabel $4,303$ dan tingkat signifikan sebesar $0,009 < 0,05$, maka variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), berarti hipotesis pertama (H_1), diterima.
2. Hipotesis kedua (H_2) : Penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil pengujian analisis regresi diperoleh t hitung sebesar $6,708 > t$ tabel $4,303$ dan tingkat signifikan sebesar $0,022 < 0,05$, maka variabel retribusi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), berarti hipotesis kedua (H_2), diterima.

4.4 Pembahasan

Penelitian yang dilakukan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2019 - 2023 dihasilkan sebagai berikut :

4.4.1. Pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hipotesis pertama (H_1) : Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil pengujian analisis regresi diperoleh t hitung sebesar $5,771 > t$ tabel $4,303$ dan tingkat signifikan sebesar $0,009 < 0,05$, maka variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), berarti hipotesis pertama (H_1), diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mailindra (2022), Casroni, et al (2022), Putri (2022), Mardiani (2022), Kencana et al. (2022), Gulo (2023), Iqbal et al. (2023), Sakinah et al. (2023) serta Kondo et al. (2024) yang menghasilkan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak daerah digunakan sebagai sumber pendapatan asli yang bisa dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah melalui badan pendapatan

daerah, mampu menggali potensi dan mengoptimalkan penerimaan pajak agar berfungsi sesuai tujuannya (Hidayati et al., 2024). Hal ini memungkinkan pemerintah daerah memperoleh dana untuk menjalankan pembangunan, pelayanan publik, dan pemeliharaan infrastruktur. Pajak daerah pada tingkat provinsi memberikan kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan, yang pada akhirnya mendukung program pembangunan di tingkat provinsi.

4.4.2. Pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hipotesis kedua (H_2) : Penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil pengujian analisis regresi diperoleh t hitung sebesar $6,708 > t$ table $4,303$ dan tingkat signifikan sebesar $0,022 < 0,05$, maka variabel retribusi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), berarti hipotesis kedua (H_2), diterima. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Gulo (2023) serta Kondojo et al. (2024) yang menghasilkan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Anggoro et al., (2023) penerapan retribusi mendistribusikan biaya barang dan jasa sesuai dengan manfaat yang diterima oleh pengguna. Retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung terhadap PAD. Semakin tinggi penerimaan dari retribusi daerah, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi juga diharapkan akan meningkat. Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan yang relatif stabil dan berpotensi memberikan kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama pada provinsi dengan kegiatan ekonomi tinggi. Hubungan positif antara retribusi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semakin tinggi retribusi yang dikumpulkan oleh provinsi, semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh, sehingga pemerintah provinsi memiliki lebih banyak dana untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

4.4.3. Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil F hitung $57,054 > F$ tabel $5,79$ dan tingkat signifikan $0,017 < 0,05$ sehingga Hipotesis ke tiga (H3) : Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat diterima atau dikatakan bahwa regresi layak digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mailindra (2022), Casroni, et al (2022), Putri (2022), Mardiani (2022), Kencana et al. (2022), Gulo (2023), Iqbal et al. (2023) serta Sakinah et al. (2023) yang menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk membiayai berbagai keperluan operasional dan pembangunan. Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan pengertian pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah tanpa adanya imbalan langsung kepada pembayar, namun hasilnya dipergunakan untuk kepentingan publik. Pajak daerah di tingkat provinsi mencakup pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan sebagai imbalan atas jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau sektor usaha. Retribusi daerah mencakup retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu, dan retribusi jasa usaha. Kedua jenis penerimaan ini berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di provinsi tersebut.

Pajak daerah diharapkan berkontribusi besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pajak adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang stabil. Pajak ini memberikan pendapatan tetap yang dapat diandalkan oleh pemerintah provinsi dalam perencanaan anggaran. Retribusi daerah juga berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun sifatnya lebih fluktuatif karena tergantung pada layanan yang diberikan pemerintah provinsi kepada masyarakat. Retribusi

memberikan kontribusi langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan, jika dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber tambahan yang signifikan.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara teoritis memiliki hubungan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin optimal pengelolaan dan peningkatan penerimaan dari kedua sumber ini, semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan. Hal ini mendukung kapasitas pemerintah provinsi untuk mendanai program pembangunan dan layanan publik.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis data mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah periode 2019 - 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Provinsi Jawa Tengah periode 2019 - 2023.
2. Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Provinsi Jawa Tengah periode 2019 – 2023.
3. Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Provinsi Jawa Tengah periode 2019 – 2023.
4. Pajak daerah memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar dibandingkan dengan pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5.2. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat memperpanjang waktu penelitian.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat mengidentifikasi variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dalam rangka melengkapi hasil penelitian terdahulu sehingga dapat diambil kesimpulan tentang apa yang sebenarnya mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu mempertahankan bahkan meningkatkan lagi pajak daerah karena mempunyai pengaruh terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilihat dari koefisien regresinya, oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan dengan memperbarui data pajak dan memperluas

basis pajak, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak, meningkatkan kualitas pengelolaan pajak daerah, meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan penggunaan teknologi dalam pengelolaan pajak daerah

4. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu memperhatikan lagi retribusi daerah karena mempunyai pengaruh terkecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilihat dari koefisien regresinya, oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan retribusi daerah dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi intensifikasi meliputi: memperbaiki regulasi terkait perizinan, memaksimalkan objek retribusi yang sudah ada, memperbaiki kualitas pelayanan retribusi, meningkatkan intensitas pengawasan, memperbaiki sistem dan model pemungutan retribusi, meningkatkan kualitas SDM serta meminimalkan biaya operasional. Sedangkan untuk strategi ekstensifikasi meliputi: melakukan identifikasi dan pendataan objek retribusi baru, merumuskan kebijakan baru yang memerlukan peraturan serta memperluas ruang lingkup jenis retribusi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D., Indriani, & Hikmat, A. A. I. (2023). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Damas Dwi Anggoro, Indriani etc.) (Z-Library).
- Bapenda DKI Jakarta. (2022). Ayo Mengenal Retribusi Daerah. Diambil dari <https://bapenda.jakarta.go.id/berita/ayo-mengenal-retribusi-daerah>.
- Casroni, Hilda Kumala Wulandari, Dumadi, Y. E. (2022). (2022). Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes (Studi Empiris Kantor Bapenda Kabupaten Brebes Periode Tahun 2016-2021), *Vol. 6*(No. 3), 5515–5525.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Undip.
- Gulo, Y. (2023). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun, *1*(1), 45–55.
- Hidayati, M., Irawati, Ginanjar, A. N., Haryanti, T., Apriyanto, H., Hakim, C. A., & Sri Haryanti, C. (2024). *BUKU AJAR PENGANTAR PERPAJAKAN*. (Efitria, Ed.). Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Iqbal, M., Anggraeni, I., & Setyana, S. (2023). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal ilmiah akuntansi, 14*, 90–103.
- Kencana, T., Aladin, A., & Armaini, R. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Syntax Transformation, 3*(08), 1144–1149. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i8.594>
- Kondo, S., Pangkey, R., & Manengkey, J. (2024). Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Kota-Kota Di Sulawesi Utara Tahun 2013-2022). *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi, 2*(2), 73–82.
- Mailindra, W. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi. *Bertuah: Journal of Shartah and Islamic Economics, 3*(1), 1–10.
- Mardiani, S. (2022). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Periode 2016-2020*. UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR.

- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan - Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurazizah, M. (2023). Analisis Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten.
- Priyatno, D. (2014). *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis* (Edisi 1). Yogyakarta: Andi Offset.
- Putri, A. R. (2022). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Periode 2016-2021. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi, dan Kewirausahaan*, 2(3), 347–357.
- Republik Indonesia. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009). Indonesia.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (2014). Indonesia.
- Republik Indonesia. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (2022). Indonesia.
- Sakinah, N., Nuridah, S., & Audina, B. P. (2023). Pengaruh Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017-2022. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6008–6021.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. (2022). *Metode Peneliatian Kualitatif*. Bandung. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019 – 2023

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019 S.D. 2023

Tahun	Pajak Daerah (Rp)		Retribusi Daerah (Rp)		Pendapatan Asli Daerah (Rp)	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2019	11.999.332.158.000	11.951.919.535.383	121.453.464.000	114.861.058.851	14.488.333.544.000	14.437.914.236.398
2020	12.007.135.432.000	11.139.173.309.780	93.728.474.000	93.279.121.699	14.267.084.822.000	13.668.282.278.855
2021	12.656.260.599.000	11.718.378.320.505	90.105.999.000	91.634.269.205	15.017.805.787.000	14.695.474.898.162
2022	13.754.458.219.000	13.484.851.151.740	109.285.847.000	115.158.014.199	16.141.754.406.000	16.264.618.853.852
2023	15.266.021.456.000	13.976.642.716.351	133.505.332.000	139.377.038.536	17.922.953.192.000	17.012.509.421.006

Sumber: Data LRA BPKAD Provinsi Jawa Tengah yang diolah 2025

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFK	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1.1	11.999.332.158.000.00	11.951.919.535.383.00	99.60	11.507.119.643.262.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.1.2	121.453.464.000.00	114.861.058.851.00	94.57	104.870.144.923.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.1.3	512.701.752.000.00	512.701.993.939.00	100.00	459.626.767.964.00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.1.1.1.1.4	1.854.846.170.000.00	1.858.431.648.225.00	100.19	1.640.219.481.700.34
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		14.488.333.544.000.00	14.437.914.236.398.00	99.65	13.711.836.037.849.30
8	PENDAPATAN TRANSFER					
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN					
10	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.1.2.1.1	765.602.451.000.00	564.290.383.834.00	73.71	760.737.570.218.00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.1.2.1.2	20.663.205.000.00	11.677.937.800.00	56.52	8.712.350.806.00
12	Dana Alokasi Umum	5.1.1.1.2.1.3	3.784.512.513.000.00	3.784.512.513.000.00	100.00	3.652.586.431.000.00
13	Dana Alokasi Khusus (fisik)	5.1.1.1.2.1.4	299.755.695.000.00	267.101.813.252.00	89.11	267.575.436.659.00
14	Dana Alokasi Khusus (non fisik)	5.1.1.1.2.1.5	6.896.199.659.000.00	6.707.320.412.787.00	97.26	6.244.165.043.013.00
15	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan		11.766.733.523.000.00	11.334.903.060.673.00	96.33	10.933.776.831.696.00
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA					
17	Dana Insentif Daerah	5.1.1.1.2.2.1	62.388.421.000.00	62.388.421.000.00	100.00	33.500.000.000.00
18	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		62.388.421.000.00	62.388.421.000.00	100.00	33.500.000.000.00
19	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH -LAINNYA					
20	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.1.2.3.1	-	1.390.419.865.00	-	1.197.321.037.00
21	Jumlah Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		-	1.390.419.865.00	-	1.197.321.037.00
22	Jumlah Pendapatan Transfer		11.829.121.944.000.00	11.398.681.901.538.00	96.36	10.968.474.152.733.00
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
24	Pendapatan Hibah	5.1.1.1.3.1	23.184.000.000.00	23.184.000.000.00	100.00	22.008.000.000.00
25	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah		23.184.000.000.00	23.184.000.000.00	100.00	22.008.000.000.00
26	JUMLAH PENDAPATAN		26.340.639.488.000.00	25.859.780.137.936.00	98.17	24.702.318.190.582.30
27	BELANJA					
28	BELANJA OPERASI					
29	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	6.868.030.507.000.00	6.591.903.141.578.00	95.98	6.468.261.263.572.00
30	Belanja Barang	5.1.2.1.2	4.996.045.454.000.00	4.562.499.451.144.00	91.32	4.042.705.957.394.00
31	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	5.351.634.443.000.00	5.155.826.080.751.00	96.34	5.150.000.983.920.00
32	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	45.235.750.000.00	44.325.750.000.00	97.99	41.442.950.000.00
33	Jumlah Belanja Operasi		17.260.946.154.000.00	16.354.554.423.473.00	94.75	15.702.411.154.886.00
34	BELANJA MODAL					
35	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	178.664.741.000.00	170.898.817.539.00	95.65	25.931.283.415.00
36	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	886.351.575.000.00	680.097.965.905.00	76.73	578.372.832.490.00
37	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	569.273.334.000.00	539.370.887.071.00	94.75	349.657.564.473.00
38	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	601.697.966.000.00	566.705.770.028.00	94.18	598.655.967.923.00
39	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	138.608.379.000.00	137.358.163.317.00	99.10	128.797.833.067.00
40	Belanja Aset Tak Berwujud	5.1.2.2.6	6.524.179.000.00	5.287.521.000.00	81.05	336.825.000.00
41	Jumlah Belanja Modal		2.381.120.174.000.00	2.099.719.124.860.00	88.18	1.681.752.306.368.00
42	BELANJA TAK TERDUGA					
43	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	23.000.000.000.00	2.662.431.206.00	11.58	13.118.505.530.00
44	Jumlah Belanja Tidak Terduga		23.000.000.000.00	2.662.431.206.00	11.58	13.118.505.530.00
45	JUMLAH BELANJA		19.665.066.328.000.00	18.456.935.979.539.00	93.86	17.397.281.966.784.00

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
46	TRANSFER					
47	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB/KOTA					
48	Bagi Hasil Pajak kepada Kab/Kota	5.1.2.4.1	5.489.857.856.000.00	5.248.472.302.270.00	95.60	4.971.230.606.896.00
49	Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota	5.1.2.4.2	1.177.017.762.000.00	1.050.456.112.049.00	89.25	1.187.190.486.179.00
50	Bantuan Keuangan kepada Desa	5.1.2.4.3	1.380.085.335.000.00	1.361.431.049.000.00	98.65	894.607.765.980.00
51	Bantuan Keuangan kepada Parpol	5.1.2.4.4	24.911.954.000.00	19.767.399.599.00	79.35	19.466.159.000.00
52	Bantuan Keuangan kepada Pemda Lain	5.1.2.4.5	14.000.000.000.00	14.000.000.000.00	100.00	8.855.572.500.00
53	Jumlah Transfer		8.085.872.907.000.00	7.694.126.862.918.00	95.16	7.081.350.590.555.00
54	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		27.750.939.235.000.00	26.151.062.842.457.00	94.23	24.478.632.557.339.00
55	SURPLUS/DEFISIT		(1.410.299.747.000.00)	(291.282.704.521.00)	20.65	223.685.633.243.34
56	PEMBIAYAAN					
57	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
58	Penggunaan SiLPA	5.1.4.1.1	1.612.602.481.000.00	1.612.602.481.841.00	100.00	1.156.338.690.485.20
59	Pencairan Dana Cadangan	5.1.4.1.2	-	-	-	350.000.000.000.00
60	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	5.1.4.1.4	-	140.403.868.00	-	275.423.625.00
61	Pembiayaan dari Sektor Perbankan	5.1.4.1.5	93.033.717.000.00	18.033.716.056.00	19.38	22.302.734.488.00
62	Penerimaan Pembiayaan		1.705.636.198.000.00	1.630.776.601.765.00	95.61	1.528.916.848.598.20
63	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
64	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1	180.000.000.000.00	180.000.000.000.00	100.00	140.000.000.000.00
65	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank	5.1.4.2.2	115.336.451.000.00	40.336.450.544.00	34.97	0.00
66	Pengeluaran Pembiayaan		295.336.451.000.00	220.336.450.544.00	74.61	140.000.000.000.00
67	Pembiayaan Netto		1.410.299.747.000.00	1.410.440.151.221.00	100.01	1.388.916.848.598.20
68	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.1.5.	-	1.119.157.446.700.00	-	1.612.602.481.841.54

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	REALISASI Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN - LRA					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA					
3	Pendapatan Pajak Daerah - Lra	5.1.1.1.1.1	12,007,135,432,000.00	11,139,173,309,780.00	92.77	11,951,919,535,383.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - Lra	5.1.1.1.1.2	93,728,474,000.00	93,279,121,699.00	99.52	114,861,058,851.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - Lra	5.1.1.1.1.3	528,788,165,000.00	530,091,029,137.00	100.25	512,701,993,939.00
6	Lain-lain Pad Yang Sah - Lra	5.1.1.1.1.4	1,637,432,751,000.00	1,905,738,818,239.00	116.39	1,858,431,648,225.00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (pad) - Lra		14,267,084,822,000.00	13,668,282,278,855.00	95.80	14,437,914,236,398.00
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER - LRA					
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lra		11,896,302,626,000.00	11,632,787,041,293.00	97.78	11,334,903,060,673.00
11	Bagi Hasil Pajak - Lra	5.1.1.1.2.1.1	957,049,948,000.00	843,392,119,954.00	88.12	564,290,383,834.00
12	Bagi Hasil Bukan Pajak/sumber Daya Alam - Lra	5.1.1.1.2.1.2	13,336,741,000.00	16,888,016,587.00	126.63	11,677,937,800.00
13	Dana Alokasi Umum (dau) - Lra	5.1.1.1.2.1.3	3,460,064,369,000.00	3,438,709,973,000.00	99.38	3,784,512,513,000.00
14	Dana Alokasi Khusus (dak) Fisik - Lra	5.1.1.1.2.1.4	386,885,324,000.00	350,564,240,958.00	90.61	267,101,813,252.00
15	Dana Alokasi Khusus (dak) Non-fisik - Lra	5.1.1.1.2.1.5	7,078,966,244,000.00	6,983,232,690,794.00	98.65	6,707,320,412,787.00
16	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - Lra		68,212,455,000.00	68,212,455,000.00	100.00	62,388,421,000.00
17	Dana Penyesuaian - Lra	5.1.1.1.2.2	68,212,455,000.00	68,212,455,000.00	100.00	62,388,421,000.00
18	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - Lra		-	1,102,159,000.00	-	1,390,419,865.00
19	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - Lra	5.1.1.1.2.3	-	1,102,159,000.00	-	1,390,419,865.00
20	Jumlah Pendapatan Transfer - Lra		11,964,515,081,000.00	11,702,101,655,293.00	97.81	11,398,681,901,538.00
21						
22	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA					
23	Pendapatan Hibah - Lra	5.1.1.1.3.1	23,652,000,000.00	23,352,000,000.00	98.73	23,184,000,000.00
24	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - Lra		23,652,000,000.00	23,352,000,000.00	98.73	23,184,000,000.00
25						
26	Jumlah Pendapatan - Lra		26,255,251,903,000.00	25,393,735,934,148.00	96.72	25,859,780,137,936.00
27	BELANJA					
28	BELANJA OPERASI					
29	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	6,698,242,058,000.00	6,483,761,623,794.00	96.80	6,591,903,141,578.00
30	Belanja Barang Dan Jasa	5.1.2.1.2	4,405,786,353,000.00	4,104,637,788,228.00	93.16	4,562,499,451,144.00
31	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	5,761,071,145,000.00	5,593,181,623,109.00	97.09	5,155,826,080,751.00
32	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	48,292,000,000.00	42,407,250,000.00	87.81	44,325,750,000.00
33	Jumlah Belanja Operasi		16,913,391,556,000.00	16,223,988,285,131.00	95.92	16,354,554,423,473.00
34						
35	BELANJA MODAL					
36	Belanja Modal Pengadaan Tanah	5.1.2.2.1	14,703,769,000.00	14,338,900,293.00	97.52	170,898,817,539.00
37	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin	5.1.2.2.2	509,897,318,000.00	494,933,371,196.00	97.07	680,097,965,905.00
38	Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan Bangunan	5.1.2.2.3	216,372,410,000.00	195,773,603,473.00	90.48	539,370,887,071.00
39	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan, Irigasi Dan Jaringan	5.1.2.2.4	193,270,690,000.00	177,713,123,124.00	91.95	566,705,770,028.00
40	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	122,200,465,000.00	113,376,388,074.00	92.78	137,358,163,317.00
41	Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya	5.1.2.2.6	1,089,100,000.00	859,119,000.00	78.88	5,287,521,000.00
42	Jumlah Belanja Modal		1,057,533,762,000.00	996,994,505,160.00	94.28	2,099,719,124,860.00
43						
44	BELANJA TAK TERDUGA					
45	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	1,834,243,841,000.00	1,783,884,978,571.00	97.25	2,662,431,206.00
46	Jumlah Belanja Tak Terduga		1,834,243,841,000.00	1,783,884,978,571.00	97.25	2,662,431,206.00
47						
48	Jumlah Belanja		19,805,169,149,000.00	19,004,867,768,862.00	95.96	18,456,935,979,539.00

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	REALISASI Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7
49	TRANSFER					
50	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN					
51	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.2.4.1	5,399,670,659,000.00	4,633,245,749,888.00	85.81	5,248,472,302,270.00
52	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan		5,399,670,659,000.00	4,633,245,749,888.00	85.81	5,248,472,302,270.00
53	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
54	Transfer Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota	5.1.2.4.2	981,881,906,000.00	845,543,195,241.00	86.11	1,050,456,112,049.00
55	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	5.1.2.4.3	1,187,687,636,000.00	1,168,083,636,000.00	98.35	1,361,431,049,000.00
56	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Parpol	5.1.2.4.4	-	-	-	19,767,399,599.00
57	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.2.4.5	-	-	-	14,000,000,000.00
58	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		2,169,569,542,000.00	2,013,626,831,241.00	92.81	2,445,654,560,648.00
59						
60						
61	Jumlah Transfer		7,569,240,201,000.00	6,646,872,581,129.00	87.81	7,694,126,862,918.00
62	Jumlah Belanja dan Transfer		27,374,409,350,000.00	25,651,740,349,991.00	93.71	26,151,062,842,457.00
63						
64	SURPLUS/DEFISIT		(1,119,157,447,000.00)	(258,004,415,843.00)	23.05	(291,282,704,521.00)
65						
66	PEMBIAYAAN					
67	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
68	Penggunaan Silpa	5.1.4.1.1	1,119,157,447,000.00	1,119,095,687,470.00	99.99	1,612,602,481,841.00
69	Penerimaan Kembali Piutang	5.1.4.1.2	-	252,540,900.00	-	-
70	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	5.1.4.1.3	-	-	-	140,403,868.00
71	Pinjaman Dalam Negeri	5.1.4.1.4	-	-	-	18,033,716,056.00
72	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		1,119,157,447,000.00	1,119,348,228,370.00	100.02	1,630,776,601,765.00
73						
74	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
75	Penyertaan Modal Pengadaan/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1	-	-	-	180,000,000,000.00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	5.1.4.2.2	-	-	-	40,336,450,544.00
77	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-	-	220,336,450,544.00
78						
79	Jumlah Pembiayaan Netto		1,119,157,447,000.00	1,119,348,228,370.00	100.02	1,410,440,151,221.00
80	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.1.5	-	861,343,812,527.00		1,119,157,446,700.00

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara



LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021



PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%	REALISASI Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	15.017.805.787.000,00	14.695.474.898.162,00	97,85	13.668.282.278.855,00
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	12.656.260.599.000,00	11.718.378.320.505,00	92,59	11.139.173.309.780,00
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	90.105.999.000,00	91.634.269.205,00	101,70	98.297.991.699,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	521.612.161.000,00	508.263.876.971,00	97,44	530.091.029.137,00
6	Lain-lain Pad Yang Sah	5.1.1.1.4	1.749.827.028.000,00	2.377.198.431.481,00	135,85	1.900.719.948.239,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (pad)		15.017.805.787.000,00	14.695.474.898.162,00	97,85	13.668.282.278.855,00
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	11.713.752.634.000,00	11.871.796.336.054,00	101,35	11.702.101.655.293,00
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	11.713.752.634.000,00	11.871.796.336.054,00	101,35	11.700.999.496.293,00
10	Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	11.645.042.029.000,00	11.803.085.731.054,00	101,36	11.632.787.041.293,00
11	Dana Insentif Daerah (did)	5.1.1.2.1.2	68.710.605.000,00	68.710.605.000,00	100,00	68.212.455.000,00
12	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2	0,00	0,00	100,00	1.102.159.000,00
13	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.2.1	0,00	0,00	100,00	1.102.159.000,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer		11.713.752.634.000,00	11.871.796.336.054,00	101,35	11.702.101.655.293,00
15	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	66.750.000.000,00	65.728.851.747,00	98,47	23.352.000.000,00
16	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	66.750.000.000,00	64.882.003.502,00	97,20	23.352.000.000,00
17	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.1.1.3.2	0,00	846.848.245,00	100,00	0,00
18	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		66.750.000.000,00	65.728.851.747,00	98,47	23.352.000.000,00
19	Jumlah Pendapatan Daerah		26.798.308.421.000,00	26.833.000.085.963,00	99,38	25.393.735.934.148,00
20	BELANJA DAERAH					
21	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	17.767.668.233.000,00	16.826.577.831.470,00	94,70	16.223.988.285.131,00
22	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	5.901.460.292.000,00	5.685.925.255.020,00	96,35	6.483.761.623.794,00
23	Belanja Barang Dan Jasa	5.1.2.1.2	5.941.112.304.000,00	5.345.399.454.776,00	89,97	4.104.637.788.228,00
24	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	4.000.000.000,00	90.482.166,00	2,26	0,00
25	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	5.845.121.847.000,00	5.728.982.384.318,00	98,01	5.593.181.623.109,00
26	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	75.973.790.000,00	66.180.255.190,00	87,11	42.407.250.000,00
27	Jumlah Belanja Operasi		17.767.668.233.000,00	16.826.577.831.470,00	94,70	16.223.988.285.131,00
28	BELANJA MODAL	5.1.2.2	1.543.430.155.000,00	1.447.620.411.245,00	93,79	996.994.505.160,00
29	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	80.927.672.000,00	79.135.275.975,00	97,79	14.338.900.293,00
30	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	5.1.2.2.2	609.841.523.000,00	578.353.949.251,00	94,84	494.933.371.196,00
31	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	5.1.2.2.3	373.053.994.000,00	330.679.148.402,00	88,64	195.773.603.473,00
32	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	5.1.2.2.4	370.616.404.000,00	351.328.654.582,00	94,80	177.713.123.124,00
33	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	108.990.562.000,00	108.123.383.035,00	99,20	113.376.388.074,00
34	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	0,00	0,00	100,00	859.119.000,00
35	Jumlah Belanja Modal		1.543.430.155.000,00	1.447.620.411.245,00	93,79	996.994.505.160,00
36	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	92.820.000.000,00	72.303.305.000,00	77,90	1.783.884.978.571,00
37	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	92.820.000.000,00	72.303.305.000,00	77,90	1.783.884.978.571,00
38	Jumlah Belanja Tidak Terduga		92.820.000.000,00	72.303.305.000,00	77,90	1.783.884.978.571,00
39	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	8.040.733.845.000,00	7.497.298.646.119,00	93,24	6.646.872.581.129,00
40	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	6.120.476.085.000,00	5.735.553.033.353,00	93,71	4.633.245.749.888,00
41	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	1.920.257.760.000,00	1.761.745.612.766,00	91,75	2.013.626.831.241,00

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN Tahun 2021	REALISASI Tahun 2021	%	REALISASI Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah Belanja Transfer		8.040.733.845.000,00	7.497.298.646.119,00	93,24	6.646.872.581.129,00
	Jumlah Belanja Daerah		27.444.652.233.000,00	25.843.800.193.834,00	94,17	25.851.740.349.991,00
	SURPLUS/DEFISIT		(646.343.812.000,00)	789.199.892.129,00	(122,10)	(258.004.415.843,00)
	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.3				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	861.343.812.000,00	861.492.992.625,00	100,02	1.119.409.987.600,54
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1	861.343.812.000,00	861.376.784.856,00	100,00	1.119.157.446.700,54
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.1.4	0,00	116.207.709,00	100,00	202.640.566,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		861.343.812.000,00	861.492.992.625,00	100,02	1.119.409.987.600,54
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	215.000.000.000,00	215.000.000.000,00	100,00	0,00
	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.3.2.1	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100,00	0,00
	Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2.2	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		215.000.000.000,00	215.000.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah Pembiayaan Netto		646.343.812.000,00	646.492.992.625,00	100,02	1.119.409.987.600,54
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		0,00	1.435.692.884.754,00		861.405.571.757,54



LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN Tahun 2022	REALISASI Tahun 2022	%	REALISASI Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	16.141.754.406.000,00	16.264.618.853.852,00	100,76	14.695.474.898.162,00
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	13.754.458.219.000,00	13.484.851.151.740,00	98,04	11.718.378.320.505,00
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	109.285.847.000,00	115.158.014.199,00	105,37	91.634.269.205,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	546.716.226.000,00	546.717.104.899,00	100,00	508.263.876.971,00
6	Lain-lain Pad Yang Sah	5.1.1.1.4	1.731.294.114.000,00	2.117.892.583.014,00	122,33	2.377.198.431.481,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (pad)		16.141.754.406.000,00	16.264.618.853.852,00	100,76	14.695.474.898.162,00
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	7.894.603.950.000,00	7.810.882.578.787,00	98,94	11.871.796.336.054,00
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	7.894.603.950.000,00	7.810.882.578.787,00	98,94	11.871.796.336.054,00
10	Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	7.833.251.450.000,00	7.749.530.078.787,00	98,93	11.803.085.731.054,00
11	Dana Insentif Daerah (did)	5.1.1.2.1.2	61.352.500.000,00	61.352.500.000,00	100,00	68.710.605.000,00
12	Jumlah Pendapatan Transfer		7.894.603.950.000,00	7.810.882.578.787,00	98,94	11.871.796.336.054,00
13	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	92.655.000.000,00	92.434.201.488,00	99,76	65.728.851.747,00
14	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	92.655.000.000,00	92.161.740.403,00	99,47	64.882.003.502,00
15	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.1.1.3.2	0,00	272.461.085,00	100,00	846.848.245,00
16	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		92.655.000.000,00	92.434.201.488,00	99,76	65.728.851.747,00
17	Jumlah Pendapatan Daerah		24.129.013.356.000,00	24.167.935.634.127,00	100,16	26.633.000.085.963,00
18	BELANJA DAERAH					
19	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	14.233.669.493.000,00	13.456.887.671.949,00	94,54	16.826.577.831.470,00
20	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	6.217.355.037.000,00	5.902.903.886.767,00	94,94	5.685.925.255.020,00
21	Belanja Barang Dan Jasa	5.1.2.1.2	5.750.890.367.000,00	5.377.369.153.895,00	93,50	5.345.399.454.776,00
22	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	6.405.087.000,00	4.958.884.836,00	77,42	90.482.166,00
23	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	2.170.297.452.000,00	2.092.761.564.803,00	96,43	5.728.982.384.318,00
24	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	88.721.550.000,00	78.894.181.648,00	88,92	66.180.255.190,00
25	Jumlah Belanja Operasi		14.233.669.493.000,00	13.456.887.671.949,00	94,54	16.826.577.831.470,00
26	BELANJA MODAL	5.1.2.2	2.015.151.410.000,00	1.713.641.630.081,00	85,04	1.447.620.411.245,00
27	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	49.037.321.000,00	17.346.322.716,00	35,37	79.135.275.975,00
28	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	5.1.2.2.2	904.691.628.000,00	767.027.589.289,00	84,78	578.353.949.251,00
29	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	5.1.2.2.3	446.596.836.000,00	359.726.308.741,00	80,55	330.679.148.402,00
30	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	5.1.2.2.4	507.655.838.000,00	475.441.543.110,00	93,65	351.328.654.582,00
31	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	107.169.787.000,00	94.099.866.225,00	87,80	108.123.383.035,00
32	Jumlah Belanja Modal		2.015.151.410.000,00	1.713.641.630.081,00	85,04	1.447.620.411.245,00
33	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	36.000.000.000,00	16.545.479.100,00	45,96	72.303.305.000,00
34	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	36.000.000.000,00	16.545.479.100,00	45,96	72.303.305.000,00
35	Jumlah Belanja Tidak Terduga		36.000.000.000,00	16.545.479.100,00	45,96	72.303.305.000,00
36	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	8.862.885.338.000,00	8.763.165.716.275,00	98,87	7.497.298.646.119,00
37	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	6.123.468.838.000,00	6.085.808.822.482,00	99,38	5.735.553.033.353,00
38	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	2.739.416.500.000,00	2.677.356.893.793,00	97,73	1.761.745.612.766,00
39	Jumlah Belanja Transfer		8.862.885.338.000,00	8.763.165.716.275,00	98,87	7.497.298.646.119,00

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN Tahun 2022	REALISASI Tahun 2022	%	REALISASI Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
41	Jumlah Belanja Daerah		25.147.706.241.000,00	23.950.240.497.405,00	95,24	25.843.800.193.834,00
42	SURPLUS/DEFISIT		(1.018.692.885.000,00)	217.695.136.722,00	(21,37)	789.199.892.129,00
43	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.3				
44	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	1.909.692.885.000,00	1.909.773.865.813,00	100,00	861.492.992.625,00
45	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1	1.435.692.885.000,00	1.435.692.146.361,00	100,00	861.376.784.856,00
46	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.1.2	474.000.000.000,00	474.081.719.452,00	100,02	116.207.769,00
47	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		1.909.692.885.000,00	1.909.773.865.813,00	100,00	861.492.992.625,00
48	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	891.000.000.000,00	891.000.000.000,00	100,00	215.000.000.000,00
49	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.3.2.1	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	100,00	200.000.000.000,00
50	Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2.2	491.000.000.000,00	491.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00
51	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		891.000.000.000,00	891.000.000.000,00	100,00	215.000.000.000,00
52	Jumlah Pembiayaan Netto		1.018.692.885.000,00	1.018.773.865.813,00	100,01	646.492.992.625,00
53	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.1.4	0,00	1.236.469.002.535,00		1.435.692.884.754,00

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

GUBERNUR JAWA TENGAH



GANJAR PRANOWO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN Tahun 2023	REALISASI Tahun 2023	%	REALISASI Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	17.922.953.192.000,00	17.012.509.421.006,00	94,92	16.264.618.853.852,00
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	15.266.021.456.000,00	13.976.642.716.351,00	91,55	13.484.851.151.740,00
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	133.505.332.000,00	139.377.038.536,00	104,40	115.158.014.199,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	638.480.906.000,00	638.482.406.528,00	100,00	546.717.104.899,00
6	Lain-lain Pad Yang Sah	5.1.1.1.4	1.884.945.498.000,00	2.258.007.259.591,00	119,79	2.117.892.583.014,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (pad)		17.922.953.192.000,00	17.012.509.421.006,00	94,92	16.264.618.853.852,00
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	8.219.885.331.000,00	8.278.928.086.424,00	100,72	7.810.882.578.787,00
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	8.219.885.331.000,00	8.278.928.086.424,00	100,72	7.810.882.578.787,00
10	Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	8.132.687.386.000,00	8.191.730.141.424,00	100,73	7.749.530.078.787,00
11	Dana Insentif Daerah (did)	5.1.1.2.1.2	87.197.945.000,00	87.197.945.000,00	100,00	61.352.500.000,00
12	Jumlah Pendapatan Transfer		8.219.885.331.000,00	8.278.928.086.424,00	100,72	7.810.882.578.787,00
13	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	79.306.782.000,00	78.296.049.245,00	98,73	92.434.201.488,00
14	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	79.306.782.000,00	77.972.123.308,00	98,32	92.161.740.403,00
15	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.1.1.3.2	0,00	323.925.937,00	100,00	272.461.085,00
16	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		79.306.782.000,00	78.296.049.245,00	98,73	92.434.201.488,00
17	Jumlah Pendapatan Daerah		26.222.145.305.000,00	25.369.733.556.675,00	96,75	24.167.935.634.127,00
18	BELANJA DAERAH	5.1.2				
19	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	15.683.378.371.000,00	14.887.780.012.763,00	94,93	13.456.887.671.949,00
20	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	6.908.461.438.000,00	6.362.326.855.074,00	92,09	5.902.903.886.767,00
21	Belanja Barang Dan Jasa	5.1.2.1.2	5.997.658.579.000,00	5.791.112.760.975,00	96,56	5.377.389.153.895,00
22	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	5.635.067.000,00	5.350.753.089,00	94,95	4.958.884.836,00
23	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	2.644.383.217.000,00	2.610.303.175.760,00	98,71	2.092.761.564.803,00
24	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	127.240.070.000,00	118.696.467.885,00	93,28	78.894.181.648,00
25	Jumlah Belanja Operasi		15.683.378.371.000,00	14.887.780.012.763,00	94,93	13.456.887.671.949,00
26	BELANJA MODAL	5.1.2.2	1.973.645.351.000,00	1.794.862.778.298,00	90,94	1.713.641.630.081,00
27	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	97.077.152.000,00	67.791.905.622,00	69,83	17.346.322.716,00
28	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	5.1.2.2.2	815.658.373.000,00	751.571.586.676,00	92,14	767.027.589.289,00
29	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	5.1.2.2.3	574.653.948.000,00	526.682.150.880,00	91,65	359.726.308.741,00
30	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	5.1.2.2.4	372.513.892.000,00	351.052.937.280,00	94,24	475.441.543.110,00
31	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	113.357.686.000,00	97.389.078.450,00	85,91	94.099.866.225,00
32	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	384.500.000,00	375.119.410,00	97,56	0,00
33	Jumlah Belanja Modal		1.973.645.351.000,00	1.794.862.778.298,00	90,94	1.713.641.630.081,00
34	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	25.000.000.000,00	740.000.000,00	2,96	16.545.479.100,00
35	Belanja Tidak Terduga		25.000.000.000,00	740.000.000,00	2,96	16.545.479.100,00
36	Jumlah Belanja Tidak Terduga		25.000.000.000,00	740.000.000,00	2,96	16.545.479.100,00
37	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	9.800.721.186.000,00	9.116.958.416.721,00	93,02	8.763.165.716.275,00
38	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	6.890.975.336.000,00	6.264.046.226.688,00	90,90	6.085.808.822.482,00
39	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	2.909.745.850.000,00	2.852.912.190.053,00	98,05	2.677.356.893.793,00
40	Jumlah Belanja Transfer		9.800.721.186.000,00	9.116.958.416.721,00	93,02	8.763.165.716.275,00

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN Tahun 2023	REALISASI Tahun 2023	%	REALISASI Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7
41	Jumlah Belanja Daerah		27.482.744.908.000,00	25.800.341.207.782,00	93,88	23.950.240.497.405,00
42	SURPLUS/DEFISIT		(1.260.599.603.000,00)	(430.607.651.107,00)	34,18	217.695.136.722,00
43	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.3				
44	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	1.330.599.603.000,00	1.330.794.071.071,00	100,01	1.909.773.865.813,00
45	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1	1.236.469.003.000,00	1.236.470.622.932,00	100,00	1.435.692.146.361,00
46	Pencairan Dana Cadangan	5.1.3.1.2	94.130.600.000,00	94.130.600.000,00	100,00	0,00
47	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.1.3	0,00	192.848.139,00	100,00	474.081.719.452,00
48	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		1.330.599.603.000,00	1.330.794.071.071,00	100,01	1.909.773.865.813,00
49	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	70.000.000.000,00	0,00	0,00	891.000.000.000,00
50	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	400.000.000.000,00
51	Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2.2	70.000.000.000,00	0,00	0,00	491.000.000.000,00
52	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		70.000.000.000,00	0,00	0,00	891.000.000.000,00
53	Jumlah Pembiayaan Netto		1.260.599.603.000,00	1.330.794.071.071,00	105,57	1.018.773.865.813,00
54	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.1.4	0,00	900.186.419.964,00		1.236.469.002.535,00



 GUBERNUR JAWA TENGAH



 WANA SUDJANA

LAMPIRAN 2 HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Frequencies Variabel

		Statistics		
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah
N	Valid	5	5	5
	Missing	0	0	0
Mean		12,454,193,006,751.80	110,861,900,498.00	15,215,759,937,654.60
Std. Deviation		1,214,813,568,623.840	19,534,705,482.964	1,378,299,794,473.012
Minimum		11,139,173,309,780	91,634,269,205	13,668,282,278,855
Maximum		13,976,642,716,351	139,377,038,536	17,012,509,421,006

LAMPIRAN 3 HASIL UJI NORMALITAS

UJI NORMALITAS

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0026550
	Std. Deviation	180895983507.34
Most Extreme Differences	Absolute	.236
	Positive	.236
	Negative	-.206
Test Statistic		.236
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

LAMPIRAN 4 HASIL UJI HETEROKEDASTISITAS

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Retribusi Daerah, Pajak Daerah ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: ABS

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.826 ^a	.683	.366	52665136476.00879

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1195010790926339100 0000.000	2	597505395463169 6000000.000	2.154	.317 ^b
	Residual	5547233200073263000 000.000	2	277361660003663 1600000.000		
	Total	1749734110933665400 0000.000	4			

a. Dependent Variable: ABS

b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-474909672244.429	325208432171.110		-1.460	.282
	Pajak Daerah	.093	.045	1.701	2.065	.175
	Retribusi Daerah	-4.764	2.789	-1.407	-1.708	.230

a. Dependent Variable: ABS

LAMPIRAN 5 HASIL UJI REGRESI BERGANDA

UJI HIPOTESIS

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Retribusi Daerah, Pajak Daerah ^b		Enter

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.991 ^a	.983	.966	255825553254.915

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	746794786638102 1000000000.000	2	373397393319051 0500000000.000	57.054	.017 ^b
	Residual	130893427396367 0800000000.000		2		
	Total	759884129377738 8000000000.000	4			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	619,974,597,280.915	1,579,728,690,558.649		.392	.733		
Pajak Daerah	11.257	.218	1.108	5.771	.009	.234	4.281
Retribusi Daerah	9.596	13.548	.136	6.708	.022	.234	4.281

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

LAMPIRAN 6 T TABEL

df	0,05	0,025
1	6.314	12.706
2	2.920	4.303
3	2.353	3.182
4	2.132	2.776
5	2.015	2.571
6	1.943	2.447
7	1.895	2.365
8	1.860	2.306
9	1.833	2.262
10	1.812	2.228
11	1.796	2.201
12	1.782	2.179
13	1.771	2.160
14	1.761	2.145
15	1.753	2.131
16	1.746	2.120
17	1.740	2.110
18	1.734	2.101
19	1.729	2.093
20	1.725	2.086
21	1.721	2.080
22	1.717	2.074
23	1.714	2.069
24	1.711	2.064
25	1.708	2.060
26	1.706	2.056
27	1.703	2.052
28	1.701	2.048
29	1.699	2.045
30	1.697	2.042
31	1.696	2.040
32	1.694	2.037
33	1.692	2.035
34	1.691	2.032
35	1.690	2.030
36	1.688	2.028
37	1.687	2.026
38	1.686	2.024
39	1.685	2.023
40	1.684	2.021
41	1.683	2.020
42	1.682	2.018
43	1.681	2.017
44	1.680	2.015
45	1.679	2.014
46	1.679	2.014
47	1.678	2.013
48	1.677	2.012
49	1.677	2.011
50	1.676	2.010
51	1.675	2.008
52	1.675	2.007

df	0,05	0,025
53	1.674	2.006
54	1.674	2.005
55	1.673	2.004
56	1.673	2.003
57	1.672	2.002
58	1.672	2.002
59	1.671	2.001
60	1.671	2.000
61	1.670	2.000
62	1.670	1.999
63	1.669	1.998
64	1.669	1.998
65	1.669	1.997
66	1.668	1.997
67	1.668	1.996
68	1.668	1.995
69	1.667	1.995
70	1.667	1.994
71	1.667	1.995
72	1.666	1.993
73	1.666	1.993
74	1.666	1.993
75	1.665	1.992
76	1.665	1.992
77	1.665	1.991
78	1.665	1.991
79	1.664	1.990
80	1.664	1.990
81	1.664	1.990
82	1.664	1.989
83	1.663	1.989
84	1.663	1.989
85	1.663	1.988
86	1.663	1.988
87	1.663	1.988
88	1.662	1.987
89	1.662	1.987
90	1.662	1.987
91	1.662	1.986
92	1.662	1.986
93	1.661	1.986
94	1.661	1.986
95	1.661	1.985
96	1.661	1.985
97	1.661	1.985
98	1.661	1.984
99	1.660	1.984
100	1.660	1.984
101	1.660	1.984
102	1.660	1.983
103	1.660	1.983
104	1.660	1.983

df	0,05	0,025
105	1.659	1.983
106	1.659	1.983
107	1.659	1.982
108	1.659	1.982
109	1.659	1.982
110	1.659	1.982
111	1.659	1.982
112	1.659	1.981
113	1.658	1.981
114	1.658	1.981
115	1.658	1.981
116	1.658	1.981
117	1.658	1.980
118	1.658	1.980
119	1.658	1.980
120	1.658	1.980
121	1.658	1.980
122	1.657	1.980
123	1.657	1.979
124	1.657	1.979
125	1.657	1.979
126	1.657	1.979
127	1.657	1.979
128	1.657	1.979
129	1.657	1.979
130	1.657	1.978
131	1.657	1.978
132	1.656	1.978
133	1.656	1.978
134	1.656	1.978
135	1.656	1.978
136	1.656	1.978
137	1.656	1.977
138	1.656	1.977
139	1.656	1.977
140	1.656	1.977
141	1.656	1.977
142	1.656	1.977
143	1.656	1.977
144	1.656	1.977
145	1.655	1.976
146	1.655	1.976
147	1.655	1.976
148	1.655	1.976
149	1.655	1.976
150	1.655	1.976
151	1.655	1.976
152	1.655	1.976
153	1.655	1.976
154	1.655	1.975
155	1.655	1.975
156	1.655	1.975

df	0,05	0,025
157	1.655	1.975
158	1.655	1.975
159	1.654	1.975
160	1.654	1.975
161	1.654	1.975
162	1.654	1.975
163	1.654	1.975
164	1.654	1.975
165	1.654	1.974
166	1.654	1.974
167	1.654	1.974
168	1.654	1.974
169	1.654	1.974
170	1.654	1.974
171	1.654	1.974
172	1.654	1.974
173	1.654	1.974
174	1.654	1.974
175	1.654	1.974
176	1.654	1.974
177	1.654	1.973
178	1.653	1.973
179	1.653	1.973
180	1.653	1.973
181	1.653	1.973
182	1.653	1.973
183	1.654	1.973
184	1.653	1.973
185	1.653	1.973
186	1.653	1.973
187	1.653	1.973
188	1.653	1.973
189	1.654	1.973
190	1.653	1.973
191	1.653	1.972
192	1.653	1.972
193	1.653	1.972
194	1.653	1.972
195	1.654	1.972
196	1.653	1.972
197	1.653	1.972
198	1.653	1.972
199	1.653	1.972
200	1.653	1.972

LAMPIRAN 7 F TABEL

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.87	1.84	1.81	1.78	1.76
114	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
115	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
116	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
117	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
118	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
119	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
121	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
122	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
123	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
124	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
126	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
127	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
128	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
129	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
130	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
131	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
132	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
133	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
134	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
135	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74

